Radar Bali

KASUS TIRTAYATRA

Jaksa Mulai Telusuri SPJ Fiktif

NEGARA - Adanya dugaan penyelewengan dana dengan menggunakan surat pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif di desa Pohsanten, Mendoyo, disikapi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Jumat (3/1) kemarin tim dari Kejari yang dipimpin Kasi Intel Ario Dewanto turun untuk melakukan penelusuran.

Informasi yang dihimpun tim Kejari tersebut turun untuk menelusuri dugaan penyelewengan dana dengan SPJ Fiktif untuk kegiatan Tirtayatra dan uang staf serta gaji tiga orang anggota badan permusyawaratan desa (BPD) yang mengundurkan diri. Untuk kegiatan Tirtayatra awalnya sudah di DP sebesar Rp 7 juta dari anggaran 2016. Namun pada akhir tahun uang panjar itu diminta lagi. Menurut pihak desa karena tidak ada uang dan akan dicari-cari dana tahun berikutnya namun SPJ sudah selesai. "SPJ nya sudah selesai. Sehingga dana itu ada indikasi digunakan secara pribadi oleh oknum perangkat desa secara pribadi," kata seorang tokoh yang minta namanya tidak ditulis.

Selain Tirtayatra uang untuk tiga staf, SPJ dibuat sampai akhir tahun. Padahal, ketiga tiga staf tersebut sudah diberhentikan empat bulan sebelumnya. "Semestinya dana itu menjadi Silpa, namun ternyata tidak ada," ujarnya. Gaji tiga orang anggota BPD yang empat bulan sebelum tutup tahun sudah mengundurkan diri juga sama. SPJ di buat sampai akhir tahun sehingga uang yang semestinya tidak keluar tetapi tidak jelas. "Ada dugaan banyak kebocoran terjadi dengan nilai puluhan juta," tandasnya. Sementara itu Kasi Intel Kejari Jembrana Ario Dewanto dikonfirmasi usai melakukan penelusuran sementara mengatakan saat ini masih dalam pengumpulan data dari informasi yang disampaikan warga. "Kami mengumpulkan data dulu karena ada informasi," tukas dia. **(nom/gup)**

Edisi : Sabtu 4 feb 2017
Hal : 27

Bali Post

Telusuri Dugaan SPJ Fiktif

Kejari Datangi Kantor Desa Pohsanten

Negara (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Jumat (3/2) kemarin mendatangi Kantor Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Kedatangan tim Kejari ini dengan maksud melakukan penelusuran terkait adanya informasi dugaan Surat Peratanggungjawaban (SPJ) fiktif.

Tim Kejari dipimpin Kasi Intel Ario Dewanto. Kedatangan mereka ini diterima Pj. Perbekel Pohsanten Putu Arya Astika. Dari informasi yang dihimpun, tim Kejari ini menelusuri adanya dugaan SPJ fiktif, salah satunya terkait anggaran tirtayatra.

"Awalnya masalah tirtayatra sudah dipanjer sebesar Rp 7 juta pada anggaran 2016. Tapi setelah tutup tahun diminta lagi. Menurut pihak desa tidak ada uang dan akan carikan dana tahun depan. Padahal SPJ sudah kelar. Jadi, ada indikasi dana digunakan oknum perangkat desa secara pribadi," kata seorang tokoh Desa Pohsanten yang minta namanya tidak disebutkan di media.

Demikian juga, SPJ tiga orang staf ada yang sampai tutup tahun. Padahal, tiga staf sudah diberhentikan empat bulan sebelumnya. "Berarti uang yang semestinya jadi silpa, tapi ternyata tidak ada," jelasnya.

Begitu pula terkait gaji BPD untuk tiga orang juga di-SPJ-kan. Padahal mereka sudah mengundurkan diri hampir empat bulan lalu. "Ada dugaan banyak kebocoran di desa. Info yang berkembang mencapai puluhan juta. Agar lebih jelas, perlu diungkap dan diselidiki. Kami hanya ingin ada pembenahan di desa," tandasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Jembrana Ario Dewanto saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya datang ke kantor desa. Pihaknya masih melakukan pengumpulan data. "Ada informasi ke anggota kami sehingga kami kumpulkan data dulu," ucapnya.

Di sisi lain, Pj. Perbekel Pohsanten Putu Arya Astika belum memberikan keterangan terkait persoalan ini. Ketika dihubungi via telepon, namun ponselnya tidak aktif. **(kmb)**

Edisi : Jumat, 4 feb 2017

Hal : 2

Radar Bali

Cek Status Lahan Nusa Dua Circle

Pansus Aset DPRD Bali Temukan 277 Catatan

DENPASAR - Kisruh perizinan atas rencana proyek pembangunan Avani Hotel & Resort di kompleks Nusa Dua Circle, Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung terus berlanjut. Pansus Aset DPRD Bali kepada *Jawa Pos Radar Bali* kemarin (4/2) mendorong untuk mengecek status awal lahan tersebut. Sebagaimana diberitakan, di atas lahan Pemprov Bali seluas 3,23 hektare tersebut akan dibangun Avani Hotel & Resort yang menelan anggaran kurang lebih Rp 2 triliun.

Ketua Pansus Aset DPRD Bali Wayan Gunawan mengatakan, pihaknya meminta agar persoalan aset pemprov harus dikembalikan terlebih dahulu ke induk semangnya. Artinya? Kata dia, status awal aset harus jelas ■

▸ Baca **Cek...** *Hal 27*

> **"Mengapa harus jelas? Karena dengan kejelasan status awal aset akan berimplikasi pada pelaporan anggaran, pertanggungjawaban, dan juga kinerja."**
>
> **WAYAN GUNAWAN**
> Ketua Pansus Aset DPRD Bali

Edisi : Minggu, 5 feb 2017

Hal :

Tribun Bali

BK DPRD Badung Tunggu Kepastian Status Parwata

■ CEK

Sambungan dari hal 21

"Mengapa harus jelas? Karena dengan kejelasan status awal aset akan berimplikasi pada pelaporan anggaran, pertanggungjawaban, dan juga kinerja. Jadi kalau lahan atau aset itu milik pemprov ya kembalikan dulu ke induk semangnya. Karena aset itu kan menghasilkan," kata Gunawan.

Dengan mengembalikan terlebih dahulu ke Pemprov Bali, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali ini mengingatkan agar jangan pengelolaan aset disalahgunakan dan berimbas pada kerugian pemerintah dan pihak lain. Dijelaskan, dalam pengelolaan dan pengoptimalan pemanfaatan aset, pihaknya terus mendorong agar Pemprov Bali senantiasa menaati aturan dan berpijak pada aturan hukum. Dasar hukum tersebut, kata Gunawan, antara lain PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Selain itu, Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemprov Bali dan Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan BMD. Aturan lainnya adalah Pergub Bali Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sisdur Pengelolaan BMD dan Pergub Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dalam penentuan jangka waktu pemanfaatan aset dan polanya, kata Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli ini, Pemprov Bali harus tetap mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2006, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Perda Nomor 10 Tahun 2007.

"Sehingga dengan dasar atau pedoman aturan itu pemanfaatan lahan dapat dilakukan melalui empat pola yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan bangun guna serah/bangun serah guna. Untuk pola sewa, mekanismenya cukup dengan surat permohonan, jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang," jelasnya. Sementara untuk pola pinjam pakai, dapat dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang.

"Sedangkan untuk pola kerjasama dilakukan melalui *"beauty contest"* untuk penentuan yang paling memenuhi syarat. Dari pola kerjasama ini, Pemprov Bali mendapat kontribusi tetap dan bagi hasil. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang," imbuhnya. Pola bangun serah guna atau bangun guna serah juga dilakukan melalui *"beauty contest"* dengan jangka waktu 30 tahun serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Dalam pola ini, selain memperoleh kontribusi, Pemprov Bali juga berhak atas bangunan yang ada di atasnya. "Jadi, dengan pedoman itu pola pemanfaatan aset memang bervariasi. Agar dalam pemanfaatan juga tidak ada terjadi diskriminasi," jelasnya. Lalu bagaimana dengan kisruh mega proyek yang disebut-disebut dibangun di atas aset pemprov dan rencananya didesain sebagai hotel, kondotel, grand ballroom, dan akomodasi pariwisata lain di Jimbaran?

Ditanya demikian, Gunawan menyatakan belum mengetahui secara detail. Hanya saja, dengan mengacu dari hasil catatan pansus aset sebelumnya, ada 277 catatan yang direkomendasi dan menurutnya belum ditindaklanjuti. "Semestinya itu yang ditindaklanjuti. Saya tidak tahu apakah (lahan yang dibangun Avani Hotel & Resort) itu masuk di dalamnya atau tidak. Semestinya ditindaklanjuti agar tidak kedaluwarsa karena sudah sangat lama," terangnya.

Termasuk saat ditanya apakah Pansus akan memanggil pihak terkait atas kasus ini, menurut Gunawan, pihaknya mengaku akan pelajari dan cek dulu. Sementara itu, sikap plin-plan Polda Bali yang menangani kasus jual beli izin kondotel yang diduga melibatkan Ketua DPRD Badung Putu Parwata ditanggapi Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung. Ketua BK DPRD Badung Nyoman Sentana mengaku masih *wait and see* atas kasus tersebut. BK, menurutnya belum bisa melakukan pemanggilan terhadap Parwata.

Ini tak terlepas dari sikap plin-plan Polda Bali yang sudah sempat mengaku menetapkan Parwata sebagai tersangka, namun belakangan diralat, dan ditegaskan status Parwata masih sebatas saksi. BK DPRD Badung akan melakukan pemanggilan, meminta penjelasan Parwata apabila Polda Bali sudah secara resmi menetapkan Parwata sebagai tersangka yang dibuktikan dengan surat penetapan tersangka. "Kewenangan BK itu adalah pelanggaran etik, bukan pelanggaran pidana. Kami masih menunggu keputusan final. Kalau nanti tersangka, bisa BK rapat meminta klarifikasi," tegas Sentana.

Di lain sisi, Kabidhumas Polda Bali AKBP Hengky Widjaya mengatakan, belum ada agenda pemanggilan ulang terhadap terlapor Putu Parwata. Penyidik, menurutnya, masih memperdalam pemeriksaan terhadap para saksi. Bagaimana dengan gelar perkara?

"Gelar perkara selalu kita lakukan usai memeriksa saksi. Jadi, jadwalnya bisa kapan saja. Tidak tergantung dengan satu orang," kata AKBP Hengky. Apakah ada petunjuk jaksa pasca terbitnya SPDP dari Kejati Bali? "Belum ada. Tunggu saja perkembangannya," pungkasnya. **(tim radar bali)**

Edisi : _____

Hal : _____

Radar Bali

Jembatan Kuning; Empat Bulan Pasca Ambruk

Mulai Tersambung, Pemkab Ingin Kelola Sendiri

Harapan masyarakat Nusa Penida - Nusa Lembongan memiliki jembatan penyeberangan baru pengganti Jembatan Kuning yang ambruk 16 Oktober 2016 lalu tak lama lagi akan terwujud. Jembatan pengganti sudah tersambung dan siap digunakan.

M.BASIR, *Nusa Penida*

IST

TERSAMBUNG: Jembatan Kuning kemarin terlihat mulai tersambung. Warga Nusa Penida-Nusa Lembongan berharap jembatan segera bisa dipakai untuk aktivitas.

PASCA Jembatan Kuning ambruk 16 Oktober tahun lalu dan menewaskan 3 korban jiwa, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VIII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, langsung bergerak. Menggunakan dana darurat Rp 3,4 miliar, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III membangun ulang jembatan legendaris yang memiliki akronim Jembatan Cinta itu.

Jembatan mulai dibangun ulang tanggal 6 November dengan mendatangkan material dari Surabaya, Jawa Timur. Sesuai rencana, pembangunan jembatan kelar akhir tahun 2016 lalu. Namun, karena cuaca buruk yang menerjang perairan Bali membuat pengerjaan jembatan terhambat. Dan, kini setelah empat bulan pasca musibah, bentuk fisik jembatan sudah terlihat seperti sedia kala ■

▸ *Baca Mulai... Hal 27*

■ MULAI

Sambungan dari hal 21

"Sudah tersambung, tapi belum bisa dipakai," ujar Ketut Surianta, warga Nusa Lembongan, kepada *Jawa Pos Radar Bali* kemarin (4/2). Sejumlah pekerja masih melakukan *finishing* jembatan yang dibuat lebih lebar dari jembatan sebelumnya. Jembatan dengan cat warna kuning untuk mempertahankan ikon pariwisata ini dibuat dengan lebar 1,6 meter, dan panjang sekitar 140 meter.

Warga kedua pulau berharap Jembatan Kuning segera selesai dikerjakan untuk mempermudah warga kedua pulau beraktivitas. Karena sejak jembatan ambruk, warga harus menggunakan perahu untuk menyeberang. Termasuk pelajar kedua pulau yang harus menyeberang dengan perahu untuk pergi dan pulang sekolah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Klungkung I Gusti Nyoman Supartana mengakui pengerjaan Jembatan Cinta beberapa kali molor dari target. "Untungnya sekarang sudah sesuai *progress*, lebih bagus dari sebelumnya," ujar Supartana. Kedua sisi jembatan sudah tersambung, tetapi lantai jembatan masih belum semuanya terpasang. Jadi, belum bisa digunakan.

Menurut Supartana, berdasar penjelasan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III, jembatan pengganti dibikin lebih kokoh. Material jembatan menggunakan baja. Demikian juga lantai jembatan. Tujuannya agar lebih kuat dan tahan dari guncangan saat dilalui pengguna jembatan. "Harapan kami, jembatan lebih kuat dan bertahan lama," tandasnya.

Terkait status hak milik aset, agar tidak "menggantung" seperti Jembatan Kuning sebelumnya, Pemkab Klungkung siap menerima, mengelola, sekaligus merawat jembatan tersebut. Karena semestinya, Jembatan Kuning menjadi aset pemerintah kabupaten. Namun status kepemilikan aset itu baru bisa diserahkan setelah 6 tahun dari selesainya proses pembangunan.

"Aturannya selama 6 tahun masih tanggung jawab Balai Jalan, jadi kalau ada kerusakan Balai Jalan yang bertanggung jawab memperbaiki. Setelah itu baru bisa diserahkan agar sepenuhnya milik pemerintah daerah," paparnya. Menurut informasi, jika sudah selesai dan siap untuk digunakan, jembatan akan di-*launching* setelah terlebih dulu diupacarai secara Hindu.

Tetapi, sebelum *launching*, masyarakat boleh menggunakan jika memang sudah layak untuk digunakan. "Sebelum dipakai, mungkin akan diupacarai kecil dulu," pungkasnya. **(*/mus)**

Edisi :

Hal :

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

Kejaksaan Badung Sedot Rp 31 Miliar

Sebelah Terminal Mengwi, Dilengkapi Parkir Bawah Tanah

DENPASAR – Rencana pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Badung terus dimatangkan. Salah satunya terkait anggaran pembangunan. Informasi yang dikumpulkan koran ini, anggaran untuk pembangunan gedung Kejari dan PN Badung diperkirakan mencapai Rp 31 miliar. "Anggaran Rp 31 miliar ini diambilkan dari APBD Badung. Tahun 2017 ini gedung Kejari Badung sudah bisa dibangun," ungkap Ketua Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria, kemarin (4/2). Pemkab Badung menyiapkan lahan seluas 1,5 hektare di sebalah Terminal Mengwi. Menurut Satria, lahan 1,5 hektare tersebut sudah siap dibangun.

Anggaran besar mencapai Rp 31 miliar itu karena gedung kejaksaan dirancang tingkat dilengkapi parkir bawah tanah atau basement. Lahan tersebut juga sudah disurvei tim dari kejaksaan dan pengadilan langsung. Sementara Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta belum lama ini mendatangi Kejari Denpasar. Giri menjelaskan, dirinya sudah menyiapkan tim teknis untuk mengkaji pembangunan.

Politisi PDI Perjuangan itu menolak sengaja memisahkan diri dari Kejari maupun PN Denpasar. Pihaknya hanya menyediakan gedung dan fasilitas lainnya. Sementara teknis operasional tetap diatur oleh kejaksaan dan pengadilan. "Kami ingin Badung menjadi Kabupaten mandiri. Tersedianya kejaksaan dan pengadilan, sekalipun volumenya kecil, menunjukkan kami sudah mandiri. Jadi, kami bukan memisahkan diri," terang Giri Prasta.

Selama ini, meski sebagai kabupaten terkaya di Bali seluruh perkara hukum baik pidana maupun perdata di Kabupaten Badung disidangkan di PN Denpasar. **(san/rid)**

Edisi : Sabtu, 5 Feb 2017
Hal : 23

Radar Bali

KORUPSI PIPANISASI

Jaksa Pulangkan Uang Panas Rp 3,4 M

DENPASAR – Dua bulan setelah putusan Pengadilan Tipikor Denpasar, Kejati Bali akhirnya berhasil memulangkan uang negara Rp 3,4 miliar. Uang tersebut merupakan uang pengganti atas kasus korupsi pipanisasi Kabupaten Karangasem dengan terpidana mantan pimpinan proyek PT Adhi Karya Parno Tris Hadiono, 47 ■

▸ Baca **Jaksa...** Hal 27

Kasus Pipanisasi Dipastikan Inkracht

■ JAKSA

Sambungan dari hal 21

"Uang pengganti Rp 3,4 miliar ditransfer ke kas negara masuk pada pendapatan negara bukan pajak," tegas Kasi Penuntutan Kejati Bali Wayan Suardi kemarin (4/2). Suardi yang juga jaksa eksekusi dalam kasus ini datang langsung ke Karangasem mengikuti proses transfer dana. Eksekusi uang pengganti dilakukan pada tanggal 31 Januari lalu.

Uang Rp 3,4 miliar tersebut diserahkan PT. Adhi Karya pada kejaksaan dalam bentuk BG atau cek mundur. Dijelaskan lebih jauh, pembayaran uang pengganti sekaligus memastikan perkara sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. **(san/mus)**

Molor Dua Bulan, Dibikin Lebih Kokoh

Edisi : Minggu, 5 Januari 2017

Hal : 21 dan 27

Radar Bali

KORUPSI

Ahli KKPE Akan Diambil dari Akademisi

GIANYAR – Niat Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, untuk menetapkan secara resmi tersangka dugaan korupsi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) senilai Rp 1 miliar molor lagi. Itu karena tim ahli dari Dinas Peternakan (Distan) Provinsi Bali tidak hadir juga ke Kejaksaan. Apabila Distan Bali tidak menggubris, pihak Kejari akan mengambil ahli dari Akademisi.

Kasi Pidana Khusus Kejari Gianyar Made Endra Arianto, menjelaskan pihak Kejari telah berkirim surat kepada Dinas Peternakan Provinsi untuk meminta keterangan salah satu pejabat terkait untuk menjelaskan masalah KPPE. "Tapi dari pihak Dinas Peternakan-nya belum ada waktu juga untuk bertemu dengan kami," ujar Endra, kemarin (6/2).

Endra sendiri sempat menghubungi langsung pihak Dinas Peternakan untuk memastikan apakah bisa pihak Distan menjadi ahli atau tidak. "Katanya sih sudah ada satu Kabid yang ditunjuk untuk menjadi ahli. Tapi terus saja berhalangan," terangnya. Itu sebabnya, penetapan tersangkanya pun menjadi molor. "Untuk mengantisipasi itu, kami punya opsi lain, akan memohon akademisi dari Unud," terangnya. Setelah ahli ini bersedia datang ke Kejari, pihak Kejari hanya perlu meminta keterangan saksi satu kali saja. "Pertanyaan sudah kami siapkan, setelah ahli diperiksa. Langsung audit. Kalau audit sekarang, Maret selesai," jelasnya.

Ditanya soal nama tersangka, pihak Kejari tidak mau menyebut dengan alasan takut digugat, namun sudah ada bayangan. "Calon-calon sudah ada," jelasnya. Ditanya apakah tersangka lebih dari satu? pihaknya enggan berkomentar. Yang jelas, kasus ini akan menyeret orang-orang yang menyalahi kewenangannya. "Memang uangnya sudah dikembalikan semuanya. Tapi, ada orang yang semestinya untuk petani, malah dia dapat," jelas jaksa asal Kabupaten Negara itu.

Dia mencontohkan, Endra yang seorang jaksa jika meminjam uang di bank pasti akan dikenakan bunga 12 persen. "Tapi karena saya pinjam di kelompok, saya cuma dapat bunga 6 persen. Jadi kredit ini tidak tepat sasaran," contoh dia.

Diberitakan sebelumnya, dari 20 nama penerima yang seharusnya para peternakan. Namun, diantara penerima itu justru terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka ada yang berstatus sebagai guru, kepala sekolah, bahkan ada yang menjabat pejabat di lingkup Pemprov Bali. **(dra/gup)**

Edisi : Selasa, 7 Februari 2017
Hal : 27